

## MEMIKIR ULANG NASIONALISME MELAYU DAN MALAYSIA: BANGSA JOHOR DALAM PERSPEKTIF KOMUNITAS TERBAYANG DAN MODERNISME ASIA

**Nurdiani Fathiraini<sup>1</sup>, Nour M. Adriani<sup>2</sup>, Labibatussolihah<sup>3</sup>**

Nurdiani Fathiraini, [fathiraini\\_dian@upi.edu](mailto:fathiraini_dian@upi.edu), Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia<sup>1</sup>

Nour M. Adriani, [adrian.2bdg@gmail.com](mailto:adrian.2bdg@gmail.com), Kiprah Research Centre, Jakarta, Indonesia<sup>2</sup>

Labibatussolihah, [labibatussolihah@upi.edu](mailto:labibatussolihah@upi.edu), Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia<sup>3</sup>

\*Correspondence Email: [labibatussolihah@upi.edu](mailto:labibatussolihah@upi.edu)

---

### **Abstract**

*Until recently, the concept of Malaysian nationalism has been the subject of debate, particularly regarding the balance between citizenship and ethnicity. The three major ethnic groups—Bumiputera (indigenous), Chinese, and Indian—have long struggled for socio-political equilibrium and justice. At a grassroots level, there is a growing alternative national identity based on territorial bonds, as seen in Johor. This idea, originating from the palace, seeks to continue past glory in modern society, but it comes with consequences, particularly concerning the broader national concept of Malay identity. Through a historical approach, the development of the monarchy and its economic role in society are examined using various primary and secondary sources. Employing Anderson's notion of imagined community and Blanc's concept of Asian modernism helps us understand the social context behind the resurgence of this national spirit. The emergence of Johor's nationalist discourse can be seen as an attempt to consolidate the traditional institution's power against its adversaries by reshaping history as the central narrative. Economic concerns are the primary driver, sparked by the weakening of Malay political unity at the federal level since the 2013 general election and the rising China economic influence at the global stage.*

**Keywords:** *nationalism; Malaysia; Johor; imagined community; Asian modernism*

---

### **Abstrak**

Hingga saat ini, konsep nasionalisme Malaysia masih menjadi bahan perdebatan, khususnya mengenai keseimbangan antara kewarganegaraan dan etnis. Tiga kelompok etnis utama—Bumiputera (pribumi), Tionghoa, dan India—telah lama berjuang demi keharmonian dan keadilan sosial-politik. Di tingkat akar rumput, terdapat peningkatan identitas nasional alternatif berdasarkan ikatan teritorial, seperti yang terlihat di Johor. Ide yang bermula dari istana ini berupaya meneruskan kejayaan masa lalu dalam masyarakat modern, namun hal ini mempunyai konsekuensi, khususnya mengenai konsep nasional identitas Melayu yang lebih luas. Melalui pendekatan sejarah, perkembangan monarki Johor dan peran ekonominya dalam masyarakat dikaji dengan menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder. Menggunakan gagasan Anderson tentang komunitas terbayang dan konsep Blanc tentang modernisme Asia membantu kita memahami konteks sosial di balik kebangkitan semangat nasional alternatif ini. Munculnya wacana nasionalis Johor dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan lembaga tradisional melawan kelompok di luar yang tidak pro kepadanya dengan membentuk kembali sejarah sebagai narasi sentral. Motivasi ekonomi adalah pendorong utama, yang dipicu oleh melemahnya persatuan politik Melayu di tingkat federal sejak pemilu tahun 2013 dan globalisasi karena kebangkitan ekonomi Tionghok.

**Kata kunci:** nasionalisme; Malaysia; Johor; komunitas terbayang; modernisme Asia

**Received** : 05 May 2024

**Accepted** : 20 May 2024

**Published** : 30 May 2024

**Copyright Notice** : **Authors retain copyright and grant the journal right of first publication** with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



## **1. LATAR BELAKANG**

Secara historis, politik Melayu tradisional berpusat pada mistisme kerajaan, di mana otoritas mutlak raja dianggap disahkan oleh kepercayaan kosmologis kuno (lihat Maaruf, 2022). Meskipun pengaruh Islamisasi, yang telah menyeimbangkan sudut pandang ini sampai batas tertentu, gagasan absolutisme tetap bertahan sebagaimana dalam gelar-gelar sultan dan raja yang digambarkan sebagai "bayangan Tuhan di bumi". Posisi tertinggi ini mengamanatkan bahwa raja harus menjaga dua jenis legitimasi di antara subjek-subjeknya: otoritas agama, yang ditunjukkan melalui peran mereka sebagai pemimpin agama, dan kemegahan duniawi. Biasanya, penguasa juga berfungsi sebagai pemimpin agama, mendelegasikan kepemimpinan agama dengan menunjuk seorang ulama sebagai Mufti, juga mengawasi masalah kepercayaan, hukum, dan pertahanan. Secara bersamaan, para penguasa harus menjaga kekayaan mereka untuk membiayai kemegahan dan kemewahan yang membedakan mereka dari rakyat biasa, seringkali hidup dengan gaya hidup kelas atas.

Seperti yang dinyatakan oleh Cribb (1999) dan Lombard (2008), hubungan kuat antara peradaban di kepulauan Asia Tenggara telah terjalin sejak zaman kuno. Sebagai wilayah yang strategis secara geografis, migrasi dan pengaruh eksternal terus membentuk budaya di daerah ini. Proses asimilasi budaya juga melibatkan adopsi konsep-konsep Timur dari India dan Cina, dan kemudian konsep-konsep Barat selama periode kolonial, yang menambah dimensi baru pada identitas modern negara-negara di wilayah ini. Ide-ide dipertukarkan melintasi batas-batas, seringkali dibawa secara dua arah oleh mereka yang datang dari luar sebagai pendatang atau perantau yang kembali dari luar negeri ke tanah air mereka. Meskipun terdapat hubungan budaya yang jelas, muncul pertanyaan mendasar setelah wujudnya negara-negara nasional: sejauh mana kesatuan dan perbedaan antara negara-negara dan entitas sosial ini dapat dipertahankan?

Menanggapi diskursus tentang kebangsaan di Asia Tenggara, Anderson (1983) berargumen bahwa nasionalisme, seperti yang diamati di Malaysia atau Indonesia, adalah sistem identitas yang fleksibel yang disebut sebagai "komunitas terbayang". Dalam konteks ini, anggota sebuah bangsa seringkali tidak pernah bertemu, sehingga terjadi representasi yang tidak lengkap dari semua gagasan dan identitas dalam bangsa tersebut. Setiap orang memiliki interpretasi mereka sendiri, namun tetap terikat dalam konstruksi yang ada. Akibatnya, selalu ada batasan antara "kita" dan "mereka". Narasi sejarah sering dimanipulasi untuk membenarkan perbedaan ini, dengan menempatkan lebih banyak penekanan pada persamaan yang abstrak. Orang Melayu di Indonesia berdasarkan sejarahnya merupakan

bagian dari komunitas yang lebih luas, bersedia berbagi identitas yang lebih besar dengan kelompok etnis lain di bekas Hindia Belanda. Situasinya di Malaysia berbeda, ketika di tengah identitas komunal lainnya yang dibentuk oleh kolonialisme, orang Melayu belum sepenuhnya merayakan kebangsaan mereka sebagai rakyat Malaysia. Ada kebanggaan akan prestasi nasional, namun rasa kebangsaan itu sendiri sering kali dibatasi oleh definisi kolonial yang terus dipertahankan, seperti agama dan gaya hidup.

Di sisi lain, Blanc (2003) mengajukan pertanyaan menarik tentang ikatan nasional di Asia dalam pengertian modern sehubungan dengan kepentingan ekonomi praktis. Berkaca dari komunitas keturunan Tionghoa di Thailand dan Filipina, ia mengusulkan pendekatan baru untuk melihat nasionalisme dalam dunia kontemporer Asia Tenggara. Baginya, keterikatan bangsa terhadap negara semakin fokus pada aspek kemakmuran material, yang semakin terlihat seiring bangkitnya ekonomi Tiongkok di dunia abad ke-21. Di negara-negara yang memiliki populasi signifikan kalangan keturunan (seperti Tionghoa dan India) kemajuan yang mereka raih dalam ekonomi dan status sosial ikut menentukan arah diskursus nasionalisme. Dalam kasus Malaysia dan beberapa perkembangan di Indonesia, mungkin pendekatan ini layak dipertimbangkan, karena ikatan identitas bersama digantikan oleh kepentingan praktis atas nama investasi dan kemajuan ekonomi. Pekerja migran lintas batas serta kebutuhan akan modal asing mendorong makna simbolis nasionalisme ke belakang.

Saati ini, Johor, sebuah negara bagian (negeri) di Malaysia, tampak menantang konsep nasionalisme di tingkat federal. Ada suara-suara yang mendukung dan mempromosikan identitas "nasional" baru yang mereka klaim telah ada jauh sebelum gagasan Malaysia muncul (Hutchinson & Nair, 2016). Menariknya, munculnya gagasan ini didominasi oleh istana, didukung oleh para penguasa tradisional dan pendukung lain dari komunitas yang dekat dengan elit monarki dan ekonomi. Sebenarnya, peran istana dalam menentukan wacana publik bukanlah hal baru di Malaysia, yang, baik secara konseptual maupun praktis, selalu berada di pusat pusaran politik etnis dan agama sejak kemerdekaan. Terlepas dari pro dan kontra dalam politik identitas di Malaysia, sebaliknya, bangsa baru Johor dalam tesis yang disuarakan berusaha mengatasi hambatan-hambatan seperti etnis dan agama dengan memperkuat peran institusi monarki dalam kehidupan sehari-hari dan membayangkan kesetaraan dan persaudaraan di antara rakyatnya sebagai "rakyat Tuanku" atau "orang istana". Situasi ini erat kaitannya dengan globalisasi dan khususnya hubungan istimewa Johor dengan Singapura dan Tiongkok secara ekonomi.

Kasus hubungan Johor-Singapura-Tiongkok dalam konteks nasionalisme Malaysia, terutama dengan kelompok minoritas Tionghoa yang ekonominya kuat namun politiknya terpinggirkan, merupakan lambang dari apa yang Blanc (2003: 285-286) sebut sebagai "...banyak orang Asia yang modern namun tidak setara, mencari cara yang tepat untuk mengendalikan hegemoni untuk mengubah hubungan sosial mereka" di dalam batas-batas teritorial negara bangsa. Baru-baru ini, gagasan tentang entitas nasional yang berbeda telah mendapatkan momentum dalam bentuk kampanye untuk "Bangsa Johor," yang dipandang sebagai berbeda dan unik dari bagian identitas Malaysia lain. Merujuk pada perspektif Blanc (2003), konsep nasionalis-ekonomi ini sangat relevan bagi Johor. Sebagai contoh, meskipun terdapat perselisihan wilayah yang kuat dengan Singapura, seperti kasus Pedra Branca (Abdullah, 2008), bisnis antara kedua negara tetap berlanjut, menggambarkan pendapat Armstrong (2015) bahwa politik dapat dengan mudah dikompromikan selama terdapat kepentingan ekonomi bersama. Demikian pula, dengan investasi Tiongkok dalam proyek Forest City, yang dianggap gagal sehingga menyebabkan "kota hantu," pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk monarki Johor yang berpengaruh, dengan tegas membela proyek tersebut untuk memastikan kelangsungannya (Rahman, 2017; Williams, 2016).

Artikel ini akan menjelaskan mengapa identitas Bangsa Johor sedang muncul kembali melalui dua pendekatan. Pertama, "keunikan historis" seringkali menyebabkan timbulnya pandangan yang berbeda. Meskipun menjadi salah satu titik fokus untuk bangkitnya "nasionalisme etnik Melayu" pasca-Perang Dunia Kedua, monarki Johor tampak waspada terhadap kemungkinan kehilangan pengaruh mereka. Pada beberapa titik, mereka menentang wacana yang dibangun oleh nasionalis yang bertujuan untuk persatuan Semenanjung dan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial. Dimensi historis ini terus diutarakan oleh para penguasa dan pendukung mereka, tidak hanya untuk menegaskan "keistimewaan" mereka tetapi juga sebagai cara untuk mengkritik kondisi nasional saat ini di negara ini.

Kedua, dimensi politik-ekonomi berfungsi sebagai alat penggalang solidaritas dan pengembangan identitas. Munculnya wacana nasionalisme Johor tampaknya erat kaitannya dengan bagaimana kepentingan lokal, terutama yang terkait dengan monarki, berinteraksi dengan kekuatan eksternal secara kepentingan ekonomi. Keinginan untuk diakui melalui tampilan kekayaan dan kemakmuran, yang dikombinasikan dengan ruang terbatas untuk nasionalisme di tingkat federal, memberikan motivasi yang kuat untuk mempromosikan "identitas baru" ini. Kasus ini menarik untuk dilihat sebagai gejala transnasionalisme yang disamarkan sebagai "lokalisasi" yang berorientasi pada akumulasi kekayaan materi.

## **2. METODE**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yang berfokus pada pemeriksaan sumber dari periode waktu yang sama dengan peristiwa yang sedang diteliti. Melalui empat langkah, kami menyelidiki konsep Bangsa Johor dalam kerangka Komunitas Terbayang dan Modernisme Asia. Pertama, langkah heuristik melibatkan pengumpulan dan eksplorasi sumber, termasuk publikasi sejarah (sumber sekunder), liputan media, dan laporan statistik dari periode tersebut (sumber primer). Selanjutnya, langkah kritik melibatkan penilaian terhadap validitas dan keandalan sumber-sumber tersebut. Ketiga, dalam langkah interpretasi, kami mensintesis data dari sumber-sumber ini untuk membangun narasi yang koheren tentang topik tersebut. Terakhir, temuan disajikan melalui penulisan sejarah dalam makalah ini (Curthoys & McGrath, 2009).

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

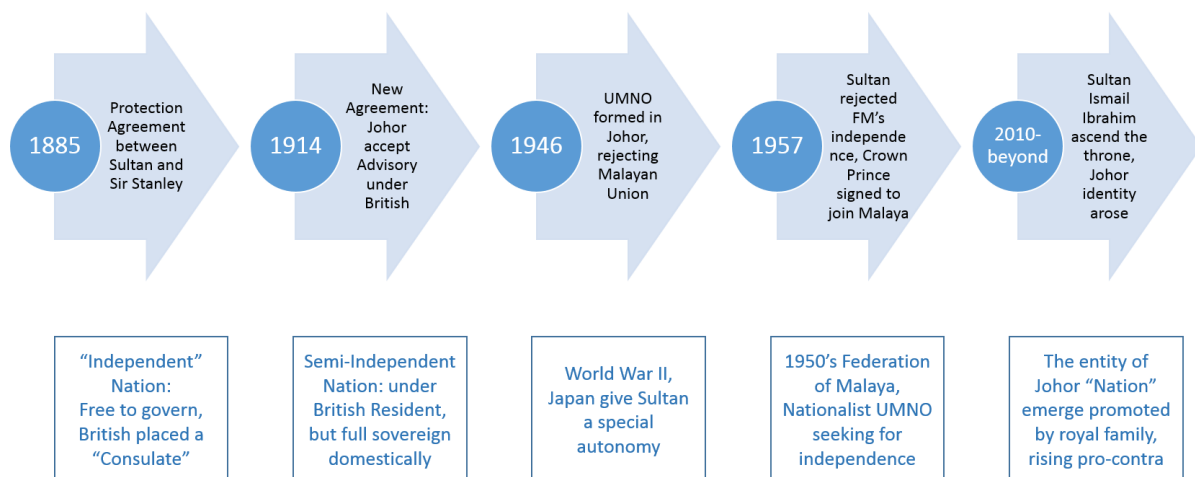
### **3.1 Nasionalisme di Kesultanan Johor Modern**

Era modern Johor dapat dilihat sebagai pembentukan baru dibandingkan dengan kelanjutan dari kerajaan kuno yang mendahuluinya. Setelah adanya persaingan kekuasaan di antara Johor, Pahang, dan Riau, stabilitas dicapai dengan memisahkan Johor-Pahang dari Riau melalui perjanjian London antara Belanda dan Inggris pada tahun 1824 (Andaya & Andaya, 2017: 124). Melalui manuver politik mereka, Inggris mengakui pemerintahan Daeng Ibrahim, putra seorang pembesar Melayu di Singapura di bawah Kesultanan Johor Lama pada tahun 1846, meskipun ada klaim bersaing atas takhta dari Tengku Ali, keturunan langsung Sultan Johor yang tinggal di Malaka. Kesepakatan dipertemukan antara keduanya pada tahun 1855, memungkinkan Johor untuk beralih dari keluarga Tengku Ali ke garis keturunan Temenggong Ibrahim. Implikasi dari kesepakatan ini terlihat dalam klaim yang memudar dari keturunan Kesultanan Johor, yang disahkan dengan naiknya Abu Bakar, putra Ibrahim, sebagai penguasa pada tahun 1862 (Adil, 1971).

Pemerintahan Sultan Abu Bakar berlangsung selama 33 tahun, dari penunjukannya sebagai Temenggong pada tahun 1862 hingga ia naik takhta menjadi raja pada tahun 1886, akhirnya meninggal dunia pada tahun 1895. Kepemimpinannya ditandai oleh upaya untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Inggris, memodernisasi sistem birokrasi, dan mempromosikan perdagangan dan investasi asing (Winstedt, 1992). Meskipun Johor berada di bawah perlindungan Inggris, kendali Sultan atas kekayaan negara memberinya kebebasan untuk melakukan perjalanan secara luas di Asia dan Eropa. Dia menjadi penguasa Melayu

pertama yang mengunjungi London pada tahun 1866 (Adil, 1971: 227). "Kebebasan" ini menciptakan kesan kedaulatan penuh, baik di dalam negeri maupun internasional, dengan Inggris menjaga kebijakan non-intervensi dalam urusan Johor dan Singapura. Pada saat yang sama, dinamika kekuasaan di antara Kesultanan, birokrasi, Inggris, dan pedagang Tionghoa di Johor sering kali terlihat saling mengisi daripada bersaing satu sama lain (Grey, 1978).

Di banyak kesultanan Melayu, terutama yang diperintah oleh *Federated Malay States* (FMS), kebijakan Inggris untuk mendatangkan buruh asing, orang Tionghoa dan India, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penduduk lokal. Non-Melayu mendominasi industri-industri seperti perkebunan karet di Selangor dan tambang timah di Perak pada abad ke-19 hingga pendudukan Jepang. Di sini, orang Tionghoa dan India mengambil peran ekonomi utama, sementara orang Melayu menemukan peluang utamanya dalam birokrasi dan pemerintahan. Sementara orang Melayu tinggal di pedesaan, orang Tionghoa tinggal di pusat ekonomi perkotaan. Akibatnya, menurut sensus tahun 1901, populasi Tionghoa dan India di Perak dan Selangor telah melampaui jumlah orang Melayu, mayoritas di Singapura dan Penang sejak tahun 1891 (Belfield, 1902; Merewether, 1892).



**Gambar 1 Lini masa Perkembangan Politik Kesultanan Johor Modern**  
**Sumber: Dikelola Penulis, (2024).**

Berbeda dengan Federated Malay States, migrasi etnis non-Melayu di Johor diinisiasi melalui undangan dari otoritas lokal. Sejak tahun 1840-an, Temenggung Daeng Ibrahim, ayah Sultan Abu Bakar, menyewa buruh kontrak Tionghoa dari Singapura untuk mengelola perkebunan gambir dan lada. Para pekerja ini dikelola dalam sistem yang dikenal sebagai *kangchu* (Andaya & Andaya, 2017) dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Sultan. Ibrahim, di bawah bimbingan Inggris, memperluas "kemitraan" ini ketika operasi kereta api dimulai pada tahun 1910, meningkatkan perdagangan impor-ekspor negara bagian (Winstedt,

1992; Grey, 1978). Akibatnya, hubungan antar-etnis di Johor berkembang secara alami, dengan komunikasi yang relatif terbuka di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Hingga akhir abad ke-19, kebijakan ini telah menyebabkan peningkatan populasi Tionghoa lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan dengan populasi Melayu (Winstedt, 1992: 133).

Meskipun konsep politik Johor sering kali diklaim muncul pada tahun 1920-an, bukti konkret yang mendukung klaim ini belum ditemukan. Sultan Ibrahim, seperti yang dicatat oleh Husain (1995: 127), sering menekankan pentingnya menjadi orang Johor dan bertindak dalam cara yang mengutamakan Johor, menyatakan bahwa "[orang-orang] Johor harus menjadi orang Johor." Namun, tahun pasti munculnya konsep ini masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Buku Winstedt tidak membahas masalah ini, seperti juga diskusi Roff tentang nasionalisme Melayu awal antara tahun 1900-an dan 1940-an. Secara dugaan, upaya menuju pembentukan identitas kolektif Johor bertepatan dengan meningkatnya kesadaran akan pendidikan dan melek huruf selama tahun 1920-an hingga 1930-an (Roff, 1967: 127-128). Sejalan dengan perkembangan lembaga pendidikan di seluruh Jajahan Inggris di Tanah Melayu, Sultan Ibrahim sendiri, seperti yang dicatat oleh Husain (1995), mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah sejak tahun 1902, bahkan memberlakukan denda bagi mereka yang melanggar dekrit ini.

### **3.2 Johor dan Perjuangan Kemerdekaan Malaya dan Malaysia**

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Inggris kembali ke Semenanjung dengan proposal untuk mendirikan Malayan Union, sebuah entitas protektorat yang menyatukan sembilan negara bagian Melayu dan Strait Settlements di bawah pemerintahan pusat di Kuala Lumpur (Andaya & Andaya, 2017: 269). Para penguasa Melayu mendapati diri mereka dalam posisi rentan karena kerja sama mereka dengan Jepang selama perang, yang memungkinkan Inggris dengan mudah mengimposisikan proposal ini. Pada awal tahun 1946, Malayan Union menjadi kenyataan, menempatkan institusi politik tradisional di bawah kendali monarki Inggris. Akibatnya, banyak penguasa Melayu kehilangan hak-hak pemerintahan praktis mereka, hanya mempertahankan peran simbolis dalam adat Melayu dan urusan Islam. Selain itu, kebijakan kewarganegaraan yang lebih liberal diperkenalkan kepada non-Melayu, menyebabkan kekhawatiran di kalangan orang Melayu yang merasa terancam oleh jumlah yang semakin bertambah (Ishak, 1999: 68-69). Dalam konteks Johor, Sultan Ibrahim dengan mudah menyerahkan kemerdekaan dan prestise-nya, sangat mengecewakan rakyatnya. Oposisi muncul dari birokrat dan rakyat jelata yang menuduh Sultan melakukan pengkhianatan. Rasa identitas Melayu yang semakin kuat menyebabkan perlawanan yang



kuat dan mobilisasi massa di bawah Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), yang terbentuk di Johor Bahru pada Mei 1946 (Andaya & Andaya, 2017).

Sultan Ibrahim, setelah menyadari penolakan yang signifikan terhadap Malayan Union oleh rakyat, memberikan dukungannya kepada gerakan UMNO, yang dipimpin oleh Dato Onn Jaafar, putra dari Ketua Menteri Johor yang pertama (Husain, 1995). Sebagai tanda solidaritas, ia menunjuk Dato Onn sebagai Ketua Menteri pada tahun 1947. Selama periode perlawanan ini, fokus UMNO adalah untuk melindungi posisi orang Melayu, yang merasa terancam oleh melemahnya kekuasaan penguasa karena Malayan Union. Tujuan ini diwujudkan dalam motto organisasi "Hidup Melayu!" (Arifin, 2014: 3). Namun, setelah tujuan ini tercapai, aspirasi yang lebih luas muncul, yang mengarah pada tuntutan kemerdekaan di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman, yang berasal dari negara bagian Kedah di utara. Meskipun Dato Onn menentang proposal ini dan mengundurkan diri dari kepemimpinan UMNO, popularitas luas Tunku, bersama dengan dukungan dari kelompok etnis non-Melayu, meyakinkan Inggris untuk setuju memberikan kemerdekaan kepada Malaya (Adam, 2005; Andaya & Andaya, 2017).

Setelah pembubaran Malayan Union pada tahun 1948, Federasi Malaya muncul. Namun, respons Sultan Ibrahim terhadap perubahan ini tidak jelas. Ia menentang wacana kemerdekaan yang mendominasi gerakan politik tahun 1950-an (Hutchinson & Nair, 2016: 14). Selama peringatan ulang tahun ke-60 nya pada tahun 1955, Sultan menyatakan kepada para pemimpin UMNO, termasuk Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman, sambil rakyat memadati jalanan sambil berseru "Merdeka!". Beliau menyampaikan:

"Jika saya adalah orang Inggris, saya akan keluar hari ini. Tetapi ingatlah; kali ini orang Inggris keluar, besok akan ada orang lain masuk ke negeri ini... Mudah untuk berteriak tentang kebebasan itu, tetapi di mana kapal perangmu? Di mana pesawatmu?" (Adil, 1971: 330-331)

Pandangan ini mungkin dibentuk oleh situasi darurat selama pemberontakan komunis di Malaya. Sultan Ibrahim mempertanyakan kemampuan Malaya untuk bertahan dari konflik tanpa dukungan Inggris, terutama karena salah satu tujuan komunis adalah untuk membongkar sistem feodal di Malaya. Namun, sikap Sultan Ibrahim yang menentang kemerdekaan berbeda dari Pangeran Mahkota, Ismail, yang mendukung kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 (Hutchinson & Nair, 2016: 15). Ismail menandatangani perjanjian yang menggabungkan Johor ke dalam Federasi. Wafatnya Sultan Ibrahim pada 1959 mengakhiri perbedaan pendapat ini, dan perbincangan mengenai identitas nasional Johor mulai memudar.

Pada tahap awal pembangunan negara Malaya atau Malaysia, terdapat perbedaan yang jelas antara kelompok politik yang berbeda: kiri, atau nasionalis radikal, dan kanan, atau konservatif (Adam, 2004; Arifin, 2014: 12). Kaum kiri sangat dipengaruhi oleh gagasan sosialis-republikan dan telah ada sejak awal abad ke-20, terutama terdiri dari individu-individu dari latar belakang rakyat jelata yang menerima pendidikan di sekolah-sekolah vernakular Melayu. Mereka memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang egaliter dan lebih kosmopolitan, menentang struktur tradisional yang hierarkis dan kaku. Sampai batas tertentu, mereka mendapat dukungan dari Jepang selama perang (Arifin, 2014: 6-7). Setelah perang, kelompok ini membentuk sebuah partai yang disebut Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) atau *Malay National Party* (MNP), yang telah menjadi gerakan yang menonjol di semenanjung sejak periode *Malayan Union* dan telah mengadvokasi kemerdekaan secara masif sejak awal (Ad

PKMM sebagai gerakan pro-republik memperjuangkan kewarganegaraan yang terbuka untuk semua orang. Aspirasi nasional berbasis kewarganegaraan ini mendapat popularitas di kalangan non-Melayu, terutama etnis Tionghoa, yang berusaha untuk terintegrasi ke dalam identitas Malaya sebagai bagian penting dari bangsa. Namun, PKMM menghadapi distorsi citra karena asosiasinya dengan revolusi komunis yang dimulai oleh Partai Komunis Malaya (PKM) pada 1947-48. Inggris membubarkan PKMM tidak lama setelah tahun 1948, dan hampir semua pemimpinnya ditahan (Ismail, 2009: 162-163). Darurat itu sendiri, secara umum, meninggalkan kesan negatif, meng-stigmatkan gerakan nasionalis kiri sebagai radikal dan merusak, mengancam eksistensi politik Melayu (Arifin, 2014: 9).

Euforia kemerdekaan pada tahun 1957 tampaknya menghilangkan ketakutan akan kehilangan tanah, sumber daya, dan memburuknya kondisi ekonomi bagi mayoritas rumpun Melayu. Namun, transformasi Federasi Malaya menjadi Malaysia pada tahun 1963, dengan menggabungkan Sabah, Sarawak, dan Singapura, membawa gejolak politik baru di tingkat regional (Andaya & Andaya, 2017: 291-292). Indonesia dan Filipina menentang kebijakan dekolonisasi Inggris, mencurigai mereka melayani kepentingan kapitalis-imperialis di Asia Tenggara. Hanya dua tahun kemudian, pada September 1965, Singapura "dikeluarkan" dari Malaysia, meskipun kurang memiliki sumber daya yang signifikan sebagai negara yang independen. Perselisihan antara pemimpin Singapura dan Malaysia sangat terkait dengan konsep kewarganegaraan yang diusulkan oleh Partai Tindakan Rakyat (PAP) yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, yang memperjuangkan "*Malaysian Malaysia*" daripada "Melayu Malaysia" (Adam, 2004; O'Shannassy, 2012).

Sentimen etnis mencapai puncaknya dalam kerusuhan mematikan yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 1969 (Ting, 2006: 33). Kerusuhan itu bermula dari kemenangan oposisi di daerah yang didominasi oleh orang Tionghoa di Selangor, memicu kemarahan di kalangan orang Melayu. Akibatnya, negara bagian tersebut sekali lagi ditempatkan di bawah keadaan darurat, dan parlemen digantung. Kepemimpinan diambil alih oleh sebuah majelis nasional, dan Tunku Abdul Rahman mengundurkan diri dari jabatan PM, digantikan oleh wakilnya, Tun Abdul Razak. Insiden ini diselesaikan dengan kesepakatan di antara pemimpin dari semua etnis, yang dikenal sebagai Dasar Ekonomi Baru (NEP). Pendekatan ini pada dasarnya menekankan afirmasi distribusi ekonomi kepada mayoritas pribumi yang lemah secara ekonomi dan bertujuan untuk memperkuat hubungan antar-etnis (Baharuddin, 1997).

Prasangka dan sentimen negatif tidak hanya muncul tetapi terus bertahan, menjadi terinstitusionalisasi seiring waktu. Sistem politik parlementer, dengan koalisi pemerintahan, jelas menunjukkan disintegrasi bangsa melalui orientasi etnisnya: UMNO untuk Melayu, Persatuan Cina Malaya (MCA) untuk Cina, dan Kongres India Malaya (MIC) untuk India, yang dikenal sebagai Perikatan sejak tahun 1957 (O'Shannassy, 2012). Penyatuan partai-partai lokal Sabah dan Sarawak ke dalam Perikatan setelah pendirian Malaysia membentuk Barisan Nasional (BN). Koalisi ini telah berhasil memegang pemerintah federal secara terus menerus sejak kemerdekaan. Oposisi belum pernah kuat, karena setiap partai memiliki ideologi yang sulit untuk disepakati. Misalnya, PAS yang Tradisionalis-Islam memiliki perbedaan mendasar dengan DAP yang sosialis (didominasi etnis China-India) membuat kerjasama menjadi sulit. Dengan struktur ini, etnis selalu menjadi sumber ketakutan bagi Bumiputera sekaligus menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan suara selama pemilihan (O'Shannassy, 2012). Di sisi lain, bagi minoritas, kondisi ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang terstruktur, diperkuat oleh sentimen pribadi seperti PM Mahathir yang diungkapkan dalam bukunya "Dilema Melayu," yang menekankan superioritas Melayu (Thas, 2013). Sikap ini juga tercermin dalam hubungan fluktuatif dengan Singapura.

Dalam konteks Johor secara umum, kebijakan luar negeri Kuala Lumpur terkait Singapura tampak tidak relevan bahkan dapat menjadi destruktif. Pertama, Johor dan Singapura, sebagai tetangga yang dekat, memiliki kebutuhan saling menguntungkan. Kedua, Johor hampir tidak menghadapi masalah etnis, seperti yang disebutkan sebelumnya. Sejarah migrasi di sana adalah bagian dari identitasnya, berdasarkan kebijakan terbuka selama era ekspansi industri (Winstedt, 1992). Kerjasama intra-etnis ini bahkan terlihat dalam bentuk dukungan politik untuk koalisi Barisan Nasional di daerah mayoritas Melayu dan Cina,

setidaknya hingga pemilihan umum tahun 2013 ketika oposisi mendominasi di daerah Cina tetapi juga berlanjut pada pemilihan umum tahun 2018 dan 2022 ketika koalisi baru yang dipimpin oleh oposisi Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan federal (Hutchinson, 2013; Hutchinson & Zhang, 2022).

### **3.3 Personifikasi Kesultanan dan Nasionalisme**

Sultan Iskandar, yang memerintah hingga kematiannya pada tahun 2010, dan putranya, Sultan Ibrahim Ismail saat ini, adalah dua orang yang telah mewarnai persepsi publik terhadap Keluarga Kerajaan Johor (Hutchinson & Nair, 2016). Secara umum, kepemimpinan Sultan Iskandar terlihat berbeda dan unik karena sikap kontroversialnya, seperti dikenal dengan sifat petualang dan temperamental. Menurut Branigin (1992) dalam *The Washington Post*, dia telah melakukan tiga tindakan kriminal bahkan ketika menjabat sebagai Sultan Johor, termasuk terlibat dalam suatu tuduhan pembunuhan. Sultan Ismail, ayahnya, pernah mencabut status pewaris tahta dan malah mengangkat saudaranya, Tunku Abdul Rahman, pada tahun 1961 (*The Sydney Morning Herald*, 3 Februari 2010; lihat Gillen, 1994; Mustafa, 2000). Penampilan dan sikapnya tidak berubah bahkan saat diangkat sebagai Raja Malaysia pada tahun 1984 hingga 1989. Dia sering dituduh menggunakan jabatan simbolis untuk fungsi eksekutif, dan bahkan ada rumor bahwa dia merencanakan kudeta terhadap pemerintahan sipil di bawah Mahathir sebelum pelantikannya.

Berbeda dengan ayahnya, Sultan Ibrahim Ismail dilihat secara positif oleh banyak orang Johor. Dia menikmati kesenangan dalam hiburan mewah, seperti membeli truk besar dari Australia, mengendarai sepeda motor Harley-Davidson ke seluruh negara, dan mengoleksi mobil mewah, termasuk salah satunya yang dihias dengan ornamen emas (Loo, 2016). Selain itu, dia sering berinteraksi dengan rakyatnya dengan cara yang santai, sering kali berpakaian sederhana dan bergaul dengan masyarakat di berbagai distrik di Johor, atau bahkan di luar gerbang istana untuk berfoto bersama mereka. Pada satu kesempatan, Sultan mengunjungi gurunya, seorang etnis Tionghoa, di hari ulang tahun mereka di Pulau Pinang. Dia juga dikenal sering makan di warung-warung lokal dan mengunjungi korban bencana alam. Meskipun gaya hidupnya mewah, tindakan-tindakan "populis" ini terdokumentasi dengan baik dan ditampilkan kepada publik lewat media sosial Facebook, Instagram, atau di halaman YouTube-nya (Hutchinson & Nair, 2016).

Di tingkat nasional, beberapa masalah seputar "pemisahan" dan kampanye untuk memperkuat sentimen identitas Johor diutarakan baik oleh Putera Mahkota maupun saudaranya melalui pernyataan-pernyataan di Facebook. Sebagai Presiden tim sepak bola

Johor, Putera Mahkota mengangkat isu pertandingan ke lapangan untuk memperkuat rasa kebangsaan Johor di kalangan pendukung. Perang kata-kata terjadi antara anak-anak Sultan dan pejabat Putrajaya dan terus meningkat terkait tuduhan skandal 1MDB, seperti yang dilaporkan oleh *The Straits Times* (15 Juni 2015). Seperti ayahnya, Sultan Ibrahim Ismail memiliki sisi kontroversial. Selain terlibat dalam beberapa kasus kriminal pada masa mudanya, kegiatan bisnisnya dan anak-anaknya juga menjadi sorotan media. Sebagai contoh, pada September 2015, muncul masalah bendera ketika, dalam status Facebook, dia memerintahkan warga Johor untuk menurunkan bendera Malaysia dan mengibarkan bendera Johor. Hal ini menjadi viral, memunculkan spekulasi akan tuntutan pemisahan dari Malaysia. Meskipun kemudian dia mengklarifikasi berita ini sebagai "bendera lain," terjadi kesalahpahaman di daerah Segamat ketika pejabat resmi melepaskan pemberitahuan kepada otoritas setempat untuk melakukannya (*Sinar Harian Online*, 22 September 2015).

Pemerintahan terpusat dan kuat monarki di Johor mempersulit posisi para politisi, terutama dalam UMNO, mengenai hubungannya dengan kebijakan dan kepemimpinan pusat partai. Meskipun tampaknya secara terbuka menantang konsep nasionalisme federasi yang dipromosikan oleh partainya, mantan Menteri Besar Johor, Datuk Khalid Nordin, dan Menteri Besar saat ini Datuk Onn Hafiz, nampaknya mengikuti kehendak keluarga kerajaan dan turut serta dalam memajukan entitas "bangsa Johor" dalam berbagai kesempatan. Platform pemerintahan Khalid, diluncurkan setelah penurunan signifikan dalam pemilihan negara bagian 2013, yang disebut "Muafakat Johor" atau "kerjasama di antara orang Johor," adalah program pembangunan berorientasi pada kebutuhan ini. Dalam tulisannya pada pertengahan 2015, Menteri Besar mengusulkan gagasan fusi, dengan mengutamakan harmoni di antara warga daripada pembangunan ekonomi. Lima nilai sosial dasar yang dipromosikan sebagai inti masyarakat mengarah pada "identitas inklusif orang Johor" (Nordin, 2015). Menanggapi kritik mantan PM Mahathir, dia menjawab,

"Pendirian saya sejalan dengan pandangan Sultan Johor mengenai masalah ini. Peningkatan nasionalisme Johor, dalam bentuk apapun, tidak dimaksudkan untuk mengarah pada hasil di mana Johor terpisah dari Federasi Malaysia."

Dia melanjutkan, "Sebuah Bangsa Johor yang bersatu, berkembang, dan hidup dalam harmoni tidak hanya akan membuat Johor dan penduduknya menjadi lebih baik, tetapi juga akan membuat Malaysia dan penduduknya menjadi lebih baik" (Othman, 2016).

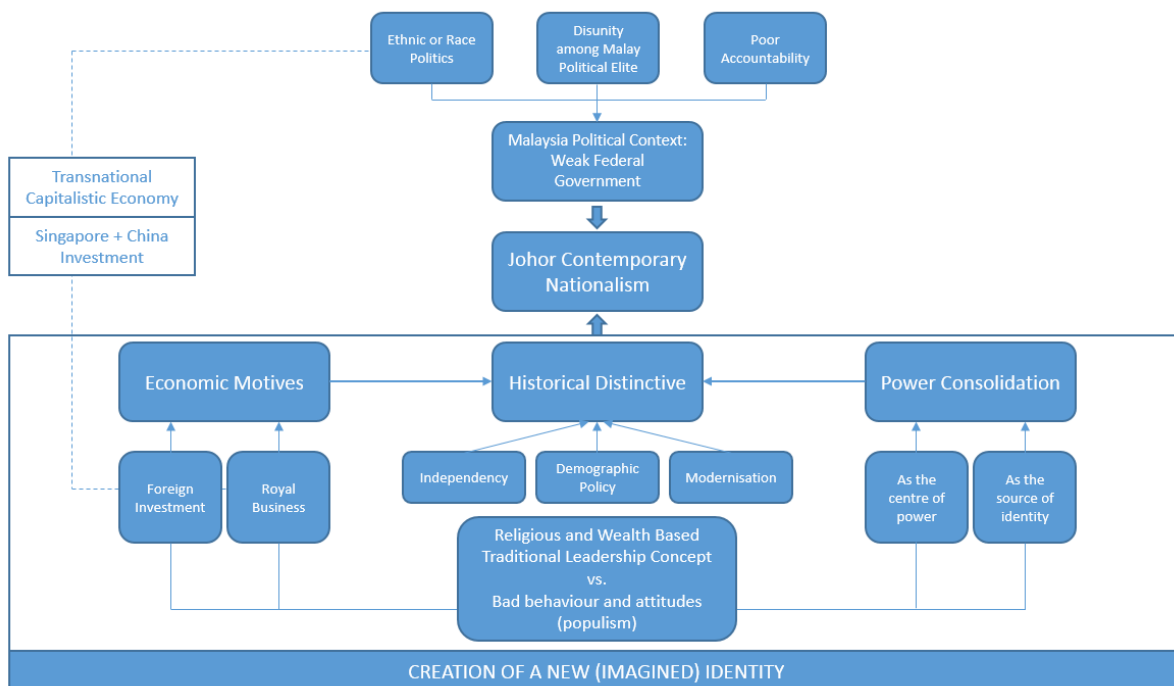
### 3.4 Diantara Solidaritas Kebangsaan dan Kekayaan

Selama pemerintahan Sultan Iskandar, keterlibatan keluarga kerajaan Johor dalam bisnis dan perdagangan ditampilkan dengan jelas oleh putra mahkota, Ibrahim Ismail, yang saat ini menjadi Sultan Johor dan Raja Malaysia ke-17 sejak awal 2024. Dia secara terbuka mengakui partisipasinya dalam bisnis perkebunan kelapa sawit baik sebelum maupun setelah naik takhta. Dalam wawancara Maret 2015 dengan *The Star Online*, Sultan Ibrahim secara terang-terangan menyatakan niatnya untuk melanjutkan usaha bisnisnya untuk mempertahankan gaya hidupnya, dengan mengutip ketidakcukupan tunjangan pemerintah sebagai sultan sebesar RM 27.000 (l.k. Rp.92 juta) per bulan. Selain dari bisnis perkebunan, Sultan Ibrahim memulai usaha kontroversial lainnya setelah menjadi penguasa Johor. Fokusnya pada real estate developer, terutama di sektor perumahan yang terjangkau. Inisiatif ini, yang dijelaskan oleh Hutchinson & Nair (2016), menjadi bagian dari program pemerintah yang dikelola di bawah sebuah undang-undang yang disahkan oleh Dewan Undangan Negeri pada Juni 2014. Namun, ada keberatan di tingkat federal karena kekhawatiran terkait dengan dugaan tindakan Sultan yang terlalu berlebihan dalam wewenangnya, terutama kemampuannya untuk menunjuk dan memberhentikan dewan eksekutif. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip monarki konstitusional. Sebagai tanggapan, Ketua Menteri Johor segera mengusulkan perubahan pada undang-undang tersebut, dengan tujuan mengembalikan beberapa fungsi mendasar Sultan sebagai penasihat (Nie, 2014).

Pada Maret 2017, tiga tahun setelahnya, Sultan memulai program perumahan murah yang diberi nama "*Bangsa Johor Dream House*," yang secara strategis terkait dengan perayaan ulang tahunnya yang ke-59 yang dijadwalkan pada bulan November (*The Star Online*, 23 Maret 2017). Pada hari peluncuran, ratusan ribu aplikasi perumahan masuk, mencerminkan minat yang luar biasa. Laporan media menyoroti rasa terima kasih publik terhadap kebaikan Sultan. Dalam sebuah wawancara, Sultan mengungkapkan visinya, menyatakan keinginannya agar rakyat Johor menjadi masyarakat pemilik rumah (Othman, 2017). Sementara itu, kegiatan bisnis dan pengembangan lahan yang melibatkan monarki meluas melampaui batas lokal hingga skala multinasional. Dua proyek properti bernilai miliaran ringgit telah direncanakan di area bersama Johor-Singapura: Kawasan Pembangunan Regional Iskandar, yang dimulai oleh sultan terdahulu, dan pulau reklamasi Forest City yang melibatkan perusahaan investasi dari China. Kedua proyek tersebut dengan tegas menunjukkan kepentingan ekonomi dan kekuasaan keluarga kerajaan dalam urusan ekonomi negara. Laporan investigasi oleh Nigel Aw (2014a & 2014b) yang dipublikasikan di *malaysiakini.com* tidak hanya mengungkap keterlibatan Sultan dalam kerja sama tersebut

tetapi juga partisipasi langsung Pangeran Mahkota, Tunku Ismail, dan saudara-saudaranya dalam menjaga bisnis di dua pulau reklamasi tersebut dari pihak-pihak yang dilihat mempermasalahkannya (lihat. Lim & Ng, 2022; Rahman, 2017; Williams, 2016).

Usaha keluarga kerajaan untuk mempertahankan keterlibatan mereka dalam proyek-proyek ini mendapat kritik dari berbagai sisi, baik secara teknis, seperti potensi kerusakan lingkungan, maupun politis, termasuk kekhawatiran tentang pergeseran demografis dan pengaruhnya dalam urusan luar negeri. Namun, mereka dengan tegas membela pendiriannya, dengan argumen bahwa tindakan mereka adalah untuk kepentingan terbaik rakyat Johor. Selama pembukaan parlemen pada Mei 2014, Sultan menanggapi kritik dengan menegaskan, "Johor milik orang Johor, dan hanya orang Johor yang memahami situasi dan kebutuhan Johor ... Mengapa orang luar harus ikut campur dan mengatur apa yang harus kita lakukan di negara kita sendiri?" (Aw 2014a). Secara menarik, penggunaan istilah "orang luar" sepertinya mencakup tidak hanya mereka yang di luar Johor tetapi juga siapa pun yang menentang inisiatif Sultan dan keluarganya, terlepas dari etnis atau identitas Johornya. Menanggapi kritik dari mantan PM Mahathir mengenai investasi asing, terutama dari Singapura, Sultan menjawab, "Mungkin orang luar ini [Mahathir] telah lupa bahwa waktunya sudah berlalu. Sebelumnya, dia mencemooh orang Melayu sebagai bangsa yang pelupa, tetapi hari ini dia sendiri menunjukkan kepelupaan" (*The Malaymail Online*, 23 Februari 2017).



**Gambar 2 Konstruk Kemunculan Nasionalisme Johor**  
Sumber: Dikelola Penulis, (2024).

#### 4. KESIMPULAN

Nasionalisme Johor, yang muncul kembali pada tahun 2010-an, dapat dilihat sebagai bentuk rekayasa sejarah yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan institusi politik tradisional, yaitu monarki. Dalam konteks sistem monarki konstitusional yang ada, kebangkitan identitas Johor, sebagai sumber prestise, bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi keluarga kerajaan di tengah rakyatnya. Melalui program-program populer seperti perumahan umum, penampilan kesederhanaan, dan retorika nasionalis, Sultan dan keluarga kerajaan menekankan loyalitas rakyat terhadap keputusannya, termasuk usaha bisnis keluarganya dan gaya hidup mewahnya. Narasi ini juga berfungsi untuk membenarkan investasi asing, terutama dari negara-negara seperti Singapura dan China, di tengah sentimen rasial dan keberatan dari elit konservatif seperti mantan PM dan beberapa kelompok Islam seperti partai Islam PAS. Dengan demikian, citra kemegahan, kemuliaan, dan nilai-nilai unik, meskipun belum sepenuhnya didefinisikan, dibudidayakan dan dipromosikan kepada publik, juga untuk menjaga agar para politisi yang terpilih dalam sistem demokratis tetap di bawah kendali monarki, yang seharusnya bersifat simbolis berdasarkan konstitusi.

Dalam kerangka pemikiran Anderson, nasionalisme fleksibel yang dapat dibentuk oleh kepentingan mereka yang menciptakannya sebagai komunitas terbayang terjadi di Johor. Di sana, kepentingan ekonomi seringkali mengalahkan gagasan persatuan nasional dalam negara Malaysia yang ada, yang belum sepenuhnya terbentuk dan oleh karena itu mudah dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis seperti kepentingan ekonomi. Istana Johor dan pendukungnya memberikan prioritas pada sikap pro-Singapura dan investasi asing China sebagai komponen penting dari visi nasionalisme mereka, menganggapnya lebih berharga daripada nasionalisme Malaysia yang lebih luas tetapi membatasi kepentingan mereka. Ideal ekonomi ini berfungsi sebagai identitas pemersatu dalam modernitas gaya Asia, sejalan dengan pandangan Armstrong tentang kekayaan materi sebagai ikatan persatuan dan pandangan Blanc tentang transnasionalisme dalam era bangkitnya kapitalisme di Asia. Johor adalah contoh sempurna bagaimana gagasan tentang nasionalitas bukan hanya idealisme yang berpusat pada agama, etnis, atau kewarganegaraan seperti yang dikenal secara luas, tetapi juga pada pemilik modal dan kepentingan yang mengelilinginya.



## 5. DAFTAR PUSTAKA

Buku, jurnal, dan artikel:

- Abdullah, K. (2008). Johor in Malaysia-Singapore Relations. In T. Shiraishi (Ed.), *Across the Causeway: A Multi-dimensional Study of Malaysia-Singapore Relations* (pp. 125–138). Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Adam, R. (2004). *Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu* (2nd ed.). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Adil, H. B. (1971). *Sejarah Johor* [Johor history]. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Andaya, W. A., & Andaya, L. Y. (2017). *A history of Malaysia* (3rd ed.). Palgrave.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.
- Arifin, A. (2014). Local historians and the historiography of Malay nationalism 1945–57: The British, the United Malays National Organization (UMNO), and the Malay left. *Kajian Malaysia*, 32(1), 1–35.
- Armstrong, S. (2015). Sino–Japanese economic embrace is warm enough to thaw the politics. *East Asia Forum Quarterly, July – September*, 29-30. <https://eastasiaforum.org/2015/09/27/sino-japanese-economic-embrace-is-warm-enough-to-thaw-the-politics/>
- Aw, N. (2014a, July 14). The case of forest city and the Johor sultan. *Malaysiakini*. <http://www.malaysiakini.com/news/268649>
- Aw, N. (2014b, July 16). Johor crown prince a top millionaire at age 30. *Malaysiakini*. <http://www.malaysiakini.com/news/268842>
- Baharuddin, S. A. (1997). The economic dimension of Malay nationalism, the socio-historical roots of the new economic policy and its contemporary implication. *The Developing Economies*, XXX-V-3, 240-261. DOI: /10.1111/j.1746-1049.1997.tb00847.x
- Belfield, H. C. (1902). *Handbook of the Federated Malay States*. Edward Stanford.
- Blanc, C. S. (2003). The thoroughly modern “Asian” capital, culture, and nation in Thailand and the Philippines. In D. Nonini & A. Ong (Eds.), *Ungrounded Empires* (pp. 261-286). Taylor and Francis.
- Branigin, W. (1992, December 29). Malaysia’s monarchs of mayhem.
- Cribb, R. (1999). Nation making: Indonesia. In D. K. Emmerson (Ed.), *Indonesia beyond Suharto, Polity, Economy, Society Transition* (pp. 3-38). M E Sharpe.
- Curthoys, A., & McGrath, A. (2009). *How to Write History that People Want to Read*. Sydney: UNSW Press.
- Gillen, M. R. (1994). The Malay Rulers' Loss of Immunity. *Occasional papers*. UVic Centre for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria. [https://www.uvic.ca/research/centres/capi/assets/docs/Ghai\\_Legal\\_Responses.pdf](https://www.uvic.ca/research/centres/capi/assets/docs/Ghai_Legal_Responses.pdf)
- Gray, C. S. (1978). *Johore, 1910-1941, studies in the colonial process* (Doctoral dissertation, Yale University).
- Husain, S. (1995). *Sejarah Johor kaitannya dengan negeri melayu* [Johor history and its relations to Malay state]. Penerbit Fajar Bakti.

- Hutchinson, F. E. (2013). The Malaysian elections: The battle for Johor. *ISEAS Perspective*, 25, 1-13. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/iseas-perspective-2013/201325-the-malaysian-elections-the-battle-for-johor/>
- Hutchinson, F. E., & Nair, V. P. (2016). The Johor sultanate: Rise or re-emergence? *Trends in Southeast Asia*, 16. ISEAS Publishing. <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2195>
- Hutchinson, F. E., & Zhang, K. (2022). A Granular Analysis of the 2022 Johor State Polls: Implications for Malaysia's Impending General Election. *ISEAS Perspective*, No. 104, October. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/09/ISEAS\\_Perspective\\_2022\\_104.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2022/09/ISEAS_Perspective_2022_104.pdf)
- Ishak, M. M. B. (1999). *From plural society to bangsa Malaysia: Ethnicity and nationalism in the politics of nation-building in Malaysia* (Doctoral dissertation, University of Leeds). [https://etheses.whiterose.ac.uk/504/1/uk\\_bl\\_ethos\\_428187.pdf](https://etheses.whiterose.ac.uk/504/1/uk_bl_ethos_428187.pdf)
- Ismail, A. R. H. (2009). 1948 and the cold war in Malaya: Samplings of Malay reactions. *Kajian Malaysia*, 27(1 & 2), 155-178. <https://doaj.org/article/1612749ff60c43fab7760b522c97fe0e>
- Lim, G., & Ng, K. K. (2022). How Malaysian Politics Shaped Chinese Real Estate Deals and Economic Development. *China Local Global*. Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace. [https://carnegieendowment.org/files/202206-GuanieLim\\_KengKhoonNg1.pdf](https://carnegieendowment.org/files/202206-GuanieLim_KengKhoonNg1.pdf)
- Lombard, D. (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu; Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. (W. P. Arifin, Trans.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Loo, G. (2016, March 8). Trucks, trains and airplanes: 5 things about the Sultan of Johor. *The NewPaper*. Retrieved from <http://www.tnp.sg/news/world/trucks-trains-and-airplanes-5-things-about-sultan-johor>
- Maaruf, S.B. (2022). *Concept of a hero in Malay society*. Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre.
- Merewether, E. M. (1892). *Report on the census of the Strait Settlements taken on the 5th April 1891*. Government Printing Press.
- Milner, A. C. (1979). *Islam and Malay Kingship* [Lecture]. Royal Asiatic Society.
- Milner, A. (2012). 'Identity monarchy': Interrogating heritage for a divided Malaysia. *Southeast Asian Studies*, 1(2), 191–212. [https://www.jstage.jst.go.jp/article/seas/1/2/1\\_KJ00008035019/\\_pdf](https://www.jstage.jst.go.jp/article/seas/1/2/1_KJ00008035019/_pdf)
- Mustafa, C. N. (2000). *The 1993 Royal immunity crisis: The Kerajaan, the constitution and the dilemma of a new Bangsa*. (Doctoral dissertation). University of Kent. DOI: 10.22024/UniKent/01.02.86148
- Nie, Y. Y. (2014, June 10). Johor housing Bill amended after uproar over sultan's powers. *Asiaone – The Straits Times*. Retrieved from <http://www.asiaone.com/malaysia/johor-housing-bill-amended-after-uproar-over-sultans-powers>
- Nordin, M. K. (2015, December 25). Muafakat identity Johor. *Utusan Online*. Retrieved from <http://www.utusan.com.my/rencana/muafakat-identiti-johor-1.172677>

- O'Shannassy, M. G. (2012). *Imagining identity: Visions of Malaysia and the interrelationship between state, society and the global* (Doctoral thesis, Australian National University).
- Othman, A. F. (2016, August 26). Johor MB: Bangsa Johor concept won't lead to separation but foster even greater unity. *New Straits Times*. Retrieved from <https://www.nst.com.my/news/2016/08/168300/johor-mb-bangsa-johor-concept-wont-lead-separation-foster-even-greater-unity>
- Othman, A. F. (2017, March 21). Special gift for Johor folk. *New Straits Times*. Retrieved from <https://www.nst.com.my/news/2017/03/222969/special-gift-johor-folk>
- Rahman, S. (2017). The Socio-Cultural Impacts of Forest City. *ISEAS Perspective*, No. 42, June. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute. [https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS\\_Perspective\\_2017\\_42.pdf](https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_Perspective_2017_42.pdf)
- Roff, W. R. (1967). *The origins of Malay nationalism*. Yale University Press.
- Thas, A. M. K. (2013). Othering the Malay in Malaysia: A planned consequence of politics? In *The Asian Conference on Arts & Humanities, the Official Conference Proceedings*. The International Academic Forum (IAFOR). <https://eprints.qut.edu.au/64530/>
- Ting, H. (2009). The politics of national identity in West Malaysia: Continued mutation or critical transition? *Southeast Asian Studies*, 47(1), 31-51. <https://kyoto-seas.org/wp-content/uploads/2012/01/470102.pdf>
- Williams, J. M. R. (2016). Evaluating the diverse impacts of megaprojects: the case of Forest City in Johor, Malaysia. *Malaysia Sustainable Cities Program, Working Paper Series*. <https://scienceimpact.mit.edu/sites/default/files/documents/Williams.pdf>
- Winstedt, R. O. (1992). *A history of Johore* [MBRAS Reprint No. 6]. MBRAS.

Berita online:

- History of violence overshadowed generosity, Sultan of Johor, 1932-2010. (2010, February 3). *The Sydney Morning Herald*. Retrieved from <http://www.smh.com.au/comment/obituaries/history-of-violence-overshadowed-generosity-20100202nayz.html>
- Sultan of Johor speaks his mind. (2015, March 18). *The Star Online*. Retrieved from <http://www.thestar.com.my/news/nation/2015/03/18/sultan-of-johor-speaks-his-mi-nd-ruler-gives-a-special-no-holds-barred-interview-on-a-wide-range-of-t/>
- War of words between Johor's Crown Prince, Malaysia's tourism minister continues. (2015, June 15). *The Star Online*. Retrieved from <http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/war-of-words-between-johors-crown-prince-malaysias-tourism-minister>
- TMJ maksudkan bendera lain bukan Jalur Gemilang. (2015, September 22). *Sinar Harian Online*. Retrieved from <http://www.sinarharian.com.my/edisi/johor/tmj-maksudkan-bendera-lain-bukan-jalur-gemilang-1.433724>
- Taking swipe at 'forgetful' Dr M, Sultan tells outsiders to keep out of Johor affairs. (2017, February 23). *The Malay Mail Online*. Retrieved from <http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/taking-swipe-at-forgetful-dr-m-sultan-tells-outsiders-to-keep-out-of-johor>

Phase one of Bangsa Johor housing project to take off mid-year. (2017, March 23). *The Star Online*. Retrieved from <http://www.thestar.com.my/news/nation/2017/03/23/phase-one-of-bangsa-johor-housing-project-to-take-off-midyear/#8RJAQdIyrwKbE5SK>